



Laporan Keuangan, Fungsi dan Manfaatnya, Sekarang dan Esok Hari

Muhtar Yahya

Pusdiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Pancoran Timur II No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

(Diterima 02 November 2015; Diterbitkan 04 Desember 2015)

Abstrak: Sebuah entitas, apapun, perusahaan, perseroan, koperasi, organisasi keagamaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lainnya dijalankan organisasinya oleh manajemen. Biasanya pihak pemberi amanah akan menyerahkan sejumlah dana untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Manajemen yang dipercaya akan memutar dana tersebut sesuai dengan keperluannya. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya adalah wajar jika pada akhir suatu masa, entah semesteran atau tahunan, pemberi amanah meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah tersebut. Manajemen akan mengolah seluruh data yang berhubungan dengan amanah, khususnya yang berkaitan dengan keuangan melalui suatu proses pembukuan atau akuntansi. Muara akhir dari proses tersebut adalah sekumpulan laporan keuangan yang terdiri dari berbagai jenis. Diantara laporan keuangan tersebut adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Kinerja, Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja, Laporan Perubahan Modal, Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, dan masih banyak yang lainnya. Induk dari semua laporan keuangan tersebut adalah Laporan Posisi Keuangan yang menginformasikan jumlah harta (aset) yang dimiliki oleh entitas dan juga jumlah potensi amanah atau kewajiban sehubungan dengan kepemilikan aset tersebut. Saat ini terdapat dua aliran besar dalam penyajian laporan keuangan, terutama sehubungan dengan masalah nilai. Yang paling umum dan sudah berjalan bertahun-tahun adalah dipergunakannya metode biaya perolehan. Informasi yang dihasilkan pun, jika tujuannya sekedar pertanggungjawaban, sudah cukup akurat. Namun saat ini keberadaan informasi nilai perolehan tersebut sedang digugat karena kadang nilainya tidak lagi relevan. Lalu apa alternatifnya? Beberapa pendapat menyatakan nilai wajar sebagai solusinya. Bagaimana definisi, cara perhitungan, metodologi dan faktor yang menjadi pertimbangan perhitungan serta hal lain yang dianggap relevan, akan dibahas dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Nilai Perolehan, Nilai Wajar.

Corresponding author: Muhtar Yahya, E-mail: muhtaryahya@gmail.com, Telp: 085694683054.

Pendahuluan

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan menjadi sebuah media komunikasi yang menjembatani antara pemangku amanah dengan pihak yang memberikan amanah. Kondisi demikian menjadikan kualitas laporan keuangan sebagai jaminan mutu dari pelaksanaan suatu pengurusan entitas. Jika manajemen sudah menjalankan tugas dengan baik maka laporan keuangannya pun mestinya menunjukkan wajah yang sama.

Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Definisi aset mengidentifikasi ciri esensialnya tetapi tidak mencoba untuk menspesifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam neraca. Harapan bahwa manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan harus cukup pasti. Itulah manfaat laporan keuangan dari dihasilkan oleh suatu entitas, pada masa sekarang ini.

Oleh karena itu muncul pertanyaan tentang manfaat laporan keuangan terutama terkait dengan peran pengukuran laporan keuangan dengan menggunakan harga perolehan dan nilai wajarnya. Tulisan ini memberikan ulasan tentang penilaian mana yang lebih pas untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dengan ukuran manfaat yang akan dapat diperoleh?.

Metodologi

Tulisan ini merupakan ulasan yang mendasarkan pada model penelitian survey yang terdiri dari survey lapangan dan survey literatur. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, seperti website atau internet. Terutama berkenaan dengan data laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai contoh pembahasan. Sedangkan survey literatur dilakukan dengan melihat studi kepustakaan sehubungan dengan landasan teori yang relevan, yaitu berupa buku dan majalah. Penulis juga melakukan penelitian terhadap standar atau ketentuan yang berlaku secara umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, baik di tataran Nasional maupun Internasional.

Data dan Fakta

Pada neraca Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi DKI Jakarta sebagai entitas publik per tanggal 31 Desember 2012, dalam websitenya, tercantum angka akun Tanah

Rp279.151.046.794.830, Gedung dan Bangunan Rp21.566.584.083.436 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp1.406.049.946.404. Sebuah angka yang sangat besar untuk sebuah entitas pemerintah. Dalam laporan posisi keuangan yang dicantumkan dalam website tersebut Pemda DKI tidak mencantumkan bagaimana kebijakan penilaian terhadap aset tersebut.

Menurut ketentuan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 (PP 24 Tahun 2005) Lampiran IX tentang Akuntansi Aset Tetap paragraph 22 dinyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehannya. Apabila penilaian dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya paragraph 24 memberikan batasan biaya perolehan suatu aset tetap yang terdiri dari harga beli atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Sebuah kesimpulan sederhana dapat ditarik bahwa nilai yang tercantum dalam laporan keuangan Pemda DKI tersebut didasarkan pada harga perolehan saat barang tersebut diperoleh (didapat). Yang berarti nilai tersebut adalah nilai yang terjadi pada masa lalu bukan pada saat laporan posisi keuangan tersebut disajikan. Jika pun yang dipakai adalah nilai wajar maka nilai wajar itu pun adalah nilai wajar saat barang tersebut diperoleh. Sekali lagi bukan nilai wajar pada saat laporan tersebut dibuat atau disajikan.

Masih sehubungan dengan penyanjian angka aset, yang menjadi sebuah pertanyaan lanjutan adalah bagaimana Pemda DKI menentukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar oleh warga negara? Tarif PBB tersebut dikenakan kepada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Yang jelas, nilai tersebut adalah bukan merupakan harga perolehan dari aset berupa tanah dan bangunan tersebut, tapi merupakan nilai jual dari aset tersebut. Ternyata pada sisi lain, Pemerintah menggunakan nilai wajar sebagai pengambilan keputusan. Berarti disimpulkan bahwa ada hubungan antara nilai tanah dan bangunan, sebagai data dengan potensi besaran PBB, sebagai keputusannya.

Oleh karena itu jika PT Telkom sebagai perusahaan komersial, melaporkan angka akun Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp94.809 milyar per tanggal 31 Desember 2014. Sebelum melihat lebih jauh kepada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan anggap aset tersebut adalah tanah dan bangunan maka Pemerintah, mungkin sebagian adalah Pemda DKI, akan mempunyai potensi PBB sebesar x% dari angka tersebut. Perhitungan ini menjadi sangat indah jika PT Telkom membukukan aset tersebut sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), sebagai nilai wajar. Artinya informasi satu dengan yang lain akan berhubungan dan mudah untuk direkonsiliasi.

PT Telkom dalam catatan atas laporan keuangannya menjelaskan tentang kebijakan akuntansinya sebagai berikut:

- Aset tetap yang diperoleh secara langsung dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.
- Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan dan (c) estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi

aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

- Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap.

Berarti bisa diambil sebuah simpulan sederhana bahwa Pemda DKI atau yang lainnya mengenakan PBB berdasarkan kepada NJOP. Nilai ini dianggap sebagai representasi nilai wajar dari aset tersebut saat ini. Fakta di lapangan, misalnya PT Telkom tadi, perusahaan membukukan nilai aset tetapnya pada laporan keuangannya masih belum menggunakan nilai wajar.

Begitu juga dengan Pemerintah Daerah juga membukukan nilai aset tetapnya bukan pada nilai wajarnya. Sementara dalam tataran pengambilan kebijakan, justru nilai wajar lah yang dipergunakan sebagai landasan utama atau patokan dalam pengambilan keputusan, misal menentukan besarnya PBB tadi.

Hasil dan Pembahasan

Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015, menjelaskan bahwa terdapat dinamika pemikiran akuntansi terkini yang mengusulkan pemikiran baru bahwa pengukuran nilai dalam laporan posisi keuangan (neraca) dengan menggunakan nilai saat ini (*current value*) sebagai nilai wajar untuk mengatasi kelemahan dari harga perolehan (*historical cost*) yang kadang kurang cocok untuk pengambilan keputusan. Beberapa keperluan menghendaki agar pengguna laporan keuangan mengambil keputusan dengan mendasarkan kepada nilai sekarang yang dianggap lebih relevan, seperti dalam hal pembayaran PBB tadi dan juga pembayaran zakat harta (*zakat maal*).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar mendefinisikan nilai wajar (*fair value*) sebagai “harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran”. Menurut PSAK ini maka nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran berbasis entitas. Oleh karena itu ketika pengukuran nilai wajar, entitas juga harus memperhatikan karakteristik aset (seperti kondisi dan lokasi, dan pembatasan lain atas penjualan dan penggunaan aset tersebut), seandainya memang karakteristik tersebut dipertimbangkan oleh pelaku pasar (*market participants*) dalam menentukan nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset dapat dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset dapat terjadi: (a) di pasar utama (*principal market*) atau (b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*).

Selanjutnya PSAK 68 menjelaskan bahwa pengukuran nilai wajar aset pada tanah dan bangunan ini harus memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis atas aset tersebut dengan dua buah alternatif pemakaian yaitu:

1. dengan menggunakan aset tersebut sebaik-baiknya, atau
2. dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain dengan posisi tawar yang terbaiknya.

Jika entitas akan menggunakan aset tersebut maka harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Penggunaan yang secara fisik dimungkinkan (*physically possible*); memperhitungkan karakteristik fisik aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset (contohnya lokasi atau ukuran properti).
- b. Penggunaan yang secara hukum diizinkan (*legally permissible*); memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset (contohnya peraturan kawasan yang berlaku atas properti).
- c. Penggunaan yang layak secara keuangan (*financially feasible*); memperhitungkan apakah penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan dan secara hukum diizinkan menghasilkan pendapatan atau arus kas yang memadai (dengan memperhitungkan biaya untuk mengkonversi aset untuk penggunaan tersebut) untuk menghasilkan imbal hasil investasi yang dibutuhkan pelaku pasar dari investasi dalam aset tersebut, digunakan dalam penggunaan tersebut.

Dalam ilustrasi dalam Pedoman Penerapan masih dalam PSAK 68 tersebut, dijelaskan bahwa ada sebuah entitas mengakuisisi tanah dalam suatu kombinasi bisnis. Tanah tersebut saat dikembangkan untuk kegunaan industri (pabrik). Wilayah terdekat dengan tanah tersebut belakangan ini ternyata juga dikembangkan untuk kegunaan perumahan, gedung apartemen bertingkat. Sehingga dengan adanya perkembangan baru tersebut, entitas menentukan bahwa tanah yang saat ini digunakan untuk pabrik dapat dikembangkan juga menjadi perumahan (yaitu untuk gedung apartemen bertingkat).

Oleh karena itu penggunaan tertinggi dan terbaik tanah akan ditentukan dengan membandingkan kedua hal sebagai berikut:

- a. nilai tanah yang saat ini dikembangkan untuk kegunaan industri (yaitu tanah akan digunakan dalam kombinasi dengan aset lain, seperti pabrik, mesin dan lainnya).
- b. nilai tanah kosong untuk kegunaan perumahan, memperhitungkan biaya pembongkaran pabrik dan biaya lain yang dibutuhkan untuk mengkonversi tanah menjadi persiapan perumahan.
- c. Penggunaan tertinggi dan terbaik tanah akan ditentukan berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara kedua nilai tersebut. Hal ini berarti bahwa nilai tanah tersebut yang semula akan dipergunakan untuk keperluan mendirikan pabrik, dan bahkan sudah ada upaya menuju kepada tujuan itu, namun jika dalam perjalanan ternyata ada alternatif pemanfaatan yang lain, yang nilainya mungkin lebih tinggi, maka nilai yang lebih tinggi tersebut dapat dipergunakan sebagai informasi baru dalam laporan keuangan. Harapannya

tentu agar pembuat keputusan yang berdasarkan laporan keuangan mampu membuat keputusan yang lebih tepat sesuai dengan informasi yang tersedia dan relevan.

Untuk mendapatkan nilai wajar tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga dimana suatu transaksi teratur untuk menjual aset akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Teknik ini diharapkan mampu memberikan nilai wajar yang representatif. Tiga teknik penilaian yang digunakan secara luas adalah:

- a. Pendekatan Pasar (*Market Approach*), yaitu teknik penilaian yang menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau sekelompok aset atau liabilitas (seperti suatu bisnis) yang identik atau sebanding (yaitu serupa). Pendekatan pasar (*market approach*) menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang identik atau sebanding, seperti bisnis. Contoh, teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar sering menggunakan pengali pasar (*market multiples*) yang dibentuk dari serangkaian perbandingan.
- b. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*), yaitu teknik penilaian yang mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) suatu aset (sering disebut sebagai biaya pengganti kini). Pendekatan biaya (*cost approach*) mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) aset. Dari perspektif pelaku pasar yang bertindak sebagai penjual, harga yang akan diterima untuk aset tersebut didasarkan pada biaya bagi pelaku pasar yang bertindak sebagai pembeli untuk memperoleh atau membangun aset pengganti dengan manfaat yang sebanding, disesuaikan dengan keusangan. Hal tersebut karena pelaku pasar yang bertindak sebagai pembeli tidak akan membayar lebih untuk aset dari jumlah yang dapat menggantikan kapasitas manfaat aset tersebut. Keusangan meliputi kerusakan fisik, keusangan fungsional (teknologi) dan keusangan ekonomik (eksternal) dan lebih luas dari penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan (alokasi biaya historis) atau tujuan pajak (menggunakan masa manfaat yang spesifik). Dalam banyak kasus metode biaya pengganti saat ini digunakan untuk mengukur nilai wajar aset berwujud yang digunakan dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain.
- c. Pendekatan Penghasilan (*Income Approach*), yaitu teknik penilaian yang mengkonversikan jumlah masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal kini (yaitu didiskontokan). Pengukuran nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai yang diindikasikan oleh harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut. Pendekatan penghasilan (*income approach*) mengkonversi jumlah masa depan, contohnya arus kas atau penghasilan dan beban, ke suatu jumlah tunggal saat ini dengan mendiskontokan. Ketika pendekatan penghasilan digunakan, pengukuran nilai wajar mencerminkan harapan pasar saat ini berbasiskan kepada nilai masa depan.

Dalam menerapkan teknik penilaian untuk mengukur nilai wajar hendaknya memaksimalkan penggunaan input relevan yang dapat diobservasi dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Input yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar dikategorikan dalam tiga level hierarki nilai wajar, yaitu:

1. Input level 1, adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
2. Input level 2, adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung atau tidak langsung.
3. Input level 3, adalah input yang tidak dapat diobservasi.

Bagaimana cara menggunakan teknik penilaian tersebut, dijelaskan dalam Pedoman Penerapan PSAK 68, dengan ilustrasi, jika sebuah entitas mengakuisisi mesin dalam suatu kombinasi bisnis dengan harga perolehan Rp35.000 lalu mesin tersebut akan dimiliki dan digunakan dalam operasi entitas. Mesin tersebut dulu dibeli oleh dari vendor luar dan telah disesuaikan (*customised*). Entitas pengakuisisi menentukan bahwa aset tersebut akan memberikan nilai maksimum kepada pelaku pasar melalui penggunaannya. Oleh karena itu, manfaat tertinggi dan terbaik mesin tersebut adalah dengan penggunaannya, dikombinasi dengan aset lain.

Entitas pengakuisisi memberikan informasi bahwa saat ini tersedia data yang memadai untuk menerapkan pendekatan pasar. Di pasar yang dapat diobservasi dapat ditemukan secara jelas informasi nilai wajar dari aset sejenis tersebut. Di sisi lain tidak ada informasi yang menunjukkan penghasilan yang akan diperoleh dari penggunaan aset tersebut. Oleh karena itu, pendekatan penghasilan (*income approach*) tidak dipakai karena tidak data tentang estimasi pendapatan.

Selanjutnya dalam penentuan nilai wajar akan dipakai pendekatan pasar dan pendekatan biaya. Aplikasinya sebagai berikut:

- a. Pendekatan pasar diterapkan menggunakan harga kuotasian untuk mesin yang serupa, disesuaikan dengan perbedaan antara mesin yang telah disesuaikan dan mesin yang serupa. Pengukuran mencerminkan harga yang akan diterima untuk mesin dalam kondisinya yang bekas pakai dan lokasinya yaitu terpasang atau terkonfigurasi untuk digunakan. Nilai wajar yang diindikasikan melalui pendekatan tersebut Rp 48.000.
- b. Pendekatan biaya diterapkan dengan mengestimasi jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk membangun mesin pengganti dengan penyesuaian yang sebanding. Estimasi tersebut memperhitungkan kondisi mesin dan lingkungan dimana mesin tersebut beroperasi, termasuk pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan fungsional, kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi mesin seperti penurunan permintaan pasar untuk mesin serupa (keusangan ekonomik) dan biaya pemasangan. Nilai wajar yang diindikasikan oleh pendekatan biaya tersebut Rp 52.000.

Berapakah nilai wajar aset tersebut? Entitas menentukan bahwa Rp48.000 yang diindikasikan oleh pendekatan pasar adalah bagian yang paling merepresentasikan nilai wajar. Penentuan tersebut dibuat berdasarkan subjektifitas relatif dari input, memperhitungkan tingkat keterbandingan antara mesin tersebut dan mesin yang serupa. Khususnya input yang digunakan dalam pendekatan pasar membutuhkan lebih sedikit penyesuaian dan tingkat penyesuaian yang tidak terlalu subjektif dibandingkan input yang digunakan dalam pendekatan biaya dan semua perbedaan atas mesin tersebut dapat dijelaskan. Hal ini juga sekaligus berarti bahwa nilai wajar adalah nilai yang paling diyakini keakuratannya oleh penyaji laporan keuangan. Angka tersebut belum tentu paling tinggi atau pun paling rendah, dari alternatif yang ada.

Simpulan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Laporan keuangan tersebut berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi (kinerja) dan laporan arus kas. Setiap laporan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi informasi yang berbeda pula. Semua laporan tersebut akan dipergunakan oleh pihak pengambilan keputusan untuk menentukan tindakannya. Semakin laporan keuangan menunjukkan data yang representatif maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat dilakukan. Pada masa yang lalu, penyajian laporan keuangan khususnya angka pada laporan posisi keuangan (neraca), kebanyakan menggunakan pendekatan biaya perolehan. Dalam pendekatan ini angka aset disajikan sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan untuk mendapatkan aset tersebut. Kombinasi maksimal yang dilakukan adalah dengan penerapan asas konservatif. Dengan prinsip ini maka aset akan disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan yang biasanya lebih kecil dari nilai perolehan. Pandangan ini tidak memberikan ruang untuk menyajikan aset dengan nilai wajar atau nilai sekarang atau nilai pasar, yang lebih tinggi dari nilai perolehannya tersebut.

Perkembangan terbaru, dengan tingkat inflasi yang semakin hari semakin meningkat, maka nilai perolehan tersebut dianggap kurang mewakili kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu muncul pandangan baru bahwa aset tersebut hendaknya disajikan dengan nilai sekarang yang dianggap sebagai nilai yang paling wajar. Harapannya dengan menyajikan nilai wajar maka kebijakan yang diambil menjadi tidak terlalu bias dibanding kondisi riil yang ada. Nilai wajar itu sendiri bukanlah sebuah angka yang mudah untuk dicari. Berbagai cara penilaian disepakati sebagai upaya untuk mencari nilai wajar dimaksud. Pendekatan yang paling populer adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya dan pendekatan penghasilan. Semua pendekatan tersebut menginginkan angka yang wajar dari aset dimaksud. Tidak ada metode yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Yang ada hanyalah, mana informasi yang bisa lebih dipercaya maka itulah informasi yang lebih handal untuk dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Semakin tidak diyakini input yang dipergunakan untuk penentuan harga tersebut maka semakin jelek pula kualitas dari informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu benarlah jika dikatakan bahwa pengambilan keputusan yang mendasarkan kepada laporan keuangan adalah wajib dilakukan oleh orang yang paham, bagaimana laporan keuangan tersebut disusun.

Daftar Pustaka

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2015. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1, Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 68 Tentang Pengukuran Nilai Wajar. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Fokusmedia.
- Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2012. Laporan Keuangan Tahunan. Jakarta
- PT Telkom. 2014. Laporan Keuangan Tahunan. Jakarta.
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Kieso, Weygandt, Warfield. 2011. Intermediate Accounting, USA: John Wiley.

Biodata Singkat

PERSONAL DATA

Name : Muhtar Yahya, Ak, CA, CPSAK, CIFRS, PIA, CMFT, MSF
Place/dob : Magelang, November, 16th, 1967
Address : Pengadegan Selatan IX, RT 02 RW 05 No. 24,
Pancoran, South Jakarta
Telephone : 0813.1876.2001 0856.9468.3054
E-mail : muhtaryahya@gmail.com
Job Spec : Widyaiswara Madya (Lecturer)



EDUCATION

1. University of Colorado at Denver, USA Graduated at December, 16th, 2001 Master of Science in Finance (MSF)
2. State College of Accountancy (STAN), Jakarta, Graduated at June 17th, 1995 Diploma IV Accountancy, Ak

SERTIFICATION

1. Registered Accountant, Ak, 1997
2. Certified IFRS Lecturer, CIFRS, IAI, 2007
3. Certified Indonesian SAK, CPSAK, IAI, 2008
4. Certified Professional Internal Auditor, PIA, PPAK, 2010
5. Chartered Accountant, CA, IAI, 2013
6. Certified Micro Finance Tutor, CMFT, Japan, 2013